

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bab terakhir dari tesis ini mengemukakan kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi yang didasarkan atas hasil penelitian. Yang dimaksud kesimpulan dalam hal ini adalah setelah menganalisa hasil penelitian maka kedudukan dan peranan dari Majelis Sekolah dalam menjembatani antara kepentingan pihak sekolah dan industri dapat jelas terlihat khususnya antara STM Penerbangan Negeri Bandung dan PT IPTN, bagaimana unsur-unsur pembentuk majelis tersebut, apa saja tugas dan kewajiban dari majelis itu, serta bagaimana Majelis Sekolah berperan dalam mendukung program pemerintah untuk menyelenggarakan program Pendidikan dengan Sistem Ganda (PSG).

Selain itu kita dapat mengetahui pula sudah berapa lama hubungan yang terjalin antara STM Penerbangan Negeri Bandung dengan PT IPTN berlangsung, kemudian model hubungan kerjasama seperti apakah yang telah dibina selama ini. Selanjutnya dalam penyelenggaraan program Pendidikan dengan Sistem Ganda model apakah yang dilakukan. Apakah model tersebut seperti hubungan kerjasama antara STM Perkapalan dan PT PAL Sidoarjo ataukah model "Dual System" dari German, atau masih dalam taraf memperpanjang waktu Praktek Kerja Lapangan (PKL). Dengan melakukan penelitian ini, kami mengharap-

kan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dari hubungan yang telah dibina selama ini antara sekolah dan industri tersebut.

Dengan harapan sebagai bagian implikasi dari tesis ini penulis dapat mengemukakan akibat dari hasil penelitian atau tuntutan terhadap pihak-pihak utama yang terkait dalam penelitian ini. Dan pada akhirnya isi rekomendasi merupakan implikasi lebih lanjut dari hasil penelitian, dimana kita dapat mengambil manfaat dan memperbaiki kekurangan yang ada dari hubungan kerjasama tersebut.

A. Kesimpulan

Sesuai dengan isi permasalahan dari penelitian ini, mengenai sejauh mana kedudukan dan peranan dari Majelis Sekolah dalam penyelenggaraan program Pendidikan dengan Sistem Ganda, maka dari itu penulis mengadakan penelitian dengan studi kasus terhadap hubungan kerjasama yang telah dibina selama ini antara STM Penerbangan Negeri Bandung dengan PT IPTN.

Sedangkan yang menjadi bahan kesimpulan dalam penelitian ini terbatas pada pertanyaan pokok penelitian atau tujuan penelitian. Adapun pertanyaan pokok penelitian, yaitu : (1) Bagaimanakah upaya-upaya tim Majelis Sekolah dalam hal membina hubungan antara pihak SMK dengan pihak industri ? (2) Bagaimanakah tugas dan kewajiban Majelis Sekolah itu ? (3) Bagaimanakah sistem

pemilihan anggota-anggota tim Majelis Sekolah ? (4) Bagaimanakah proses penyelenggaraan program Pendidikan dengan Sistem Ganda ? (5) Bagaimanakah kedudukan dan fungsi tim Majelis Sekolah dalam struktur organisasi Pola Kerjasama Pelaksanaan Program Pendidikan dengan Sistem Ganda tersebut ? (6) Apakah keuntungan dan kendala bagi sekolah, murid, dan industri dalam program Pendidikan dengan Sistem Ganda tersebut ? (7) Apakah keuntungan dan kendala dalam membina hubungan kerjasama tersebut ?.

1. Kesimpulan terhadap pertanyaan pokok penelitian pertama, yaitu mengenai upaya-upaya tim Majelis Sekolah dalam hal membina hubungan antara pihak sekolah dan industri.

Dalam membina hubungan kerjasama antara sekolah dan industri, didasarkan pada naskah perjanjian kerjasama Nomor : 359 A/D.IN/BPPT/XI/1992 dan Nomor : 013/M-/BPIS/VIII/94 serta Nomor : 021a/U/94 (terlampir).

Hubungan kerjasama tersebut berlaku selama lima tahun dalam satu periode, dan saat ini sudah berjalan hampir menuju periode ketiga. Naskah perjanjian kerjasama mulai periode satu dan dua ditandatangani oleh pihak pertama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud, pihak kedua BPPT, pihak ketiga PT IPTN. Selanjutnya pada periode ketiga, yang menandatangani naskah perjanjian kerjasama, yaitu sebagai pihak pertama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah Depdikbud, dan pihak kedua Deputi Administrasi Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS). Perubahan ini terjadi, karena PT IPTN termasuk 10 industri di bawah naungan BPIS.

Adapun tindak lanjut dari hasil hubungan ini tim Majelis Sekolah telah dapat menghasilkan suatu program kerja untuk dioperasionalkan pada penyelenggaraan Pendidikan dengan Sistem Ganda tahun ajaran 1995/1996 (terlampir).

Tim Majelis Sekolah STM Penerbangan Negeri Bandung dan PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT IPTN) berperan dalam pertukaran informasi baik yang diperoleh dari sekolah maupun dari tempat kerja di perusahaan.

Selain itu di dalam penyelenggaraan program Pendidikan dengan Sistem Ganda (PSG), tim Majelis Sekolah melakukan kegiatan mulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pengevaluasian terlaksananya kegiatan tersebut.

Tim Majelis Sekolah telah dapat dilembagakan, karena sudah dapat memenuhi kaidah sebagai suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang, memiliki tujuan, saling berinteraksi, ada pembagian tugas dan tanggung jawab, seperti yang dikatakan oleh Talcott Parsons (1960:17) dalam buku karangan Amitai Etzioni bahwa organisasi merupakan unit sosial (atau pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai

tujuan-tujuan tertentu.

Tim Majelis Sekolah benar-benar bertanggung jawab atas terselenggaranya program PSG tersebut. Hal ini dapat dilihat dari program kerjanya, policy pendanaan, tugas dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab (tertera dalam naskah perjanjian kerjasama Dikdasmen Depdikbud - BPIS).

Pembagian tugas dalam tim Majelis Sekolah ini berdasarkan bidang kerja, sehingga dapat terlihat sejauh mana tanggung jawab dari masing-masing anggota dan sehubungan pembagian tugas tersebut, dengan melibatkan unsur-unsur keanggotaan dari pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan tempat kerja, mekanisme kerja tim Majelis Sekolah ini terlihat lebih lancar.

Peran Tim Majelis Sekolah dalam membina hubungan antara sekolah dan tempat kerja adalah agar sumber daya yang ada di sekolah dapat sesuai dengan sumber daya yang ada di industri.

Menurut pendapat penulis, berdasarkan pada isi teori dari Finch & Mc Gough bahwasannya unsur-unsur keanggotaan dari suatu tim harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam areanya, karena jika tidak maka hasil yang diperoleh kemungkinan besar tidak akan mewakili area dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Oleh karena itu unsur-unsur terpenting yang harus ada dalam tim penghubung tersebut sesuai dengan areanya adalah dari pihak sekolah dan industri, sehingga informasi yang akan diperoleh sudah pasti tidak akan

kabur dan selain itu program kerja harus jelas agar pertanggungjawabannya akan lebih mudah. Apabila tanggung jawab sudah terinci dengan jelas maka pengajuan pendanaan diharapkan akan lebih mudah.

2. untuk kesimpulan dari pertanyaan pokok penelitian yang kedua, yakni mengenai tugas dan kewajiban dari Tim MS.

Tugas dan tanggung jawab dari Tim MS yang berdasarkan naskah perjanjian kerjasama pertama dan kedua, memiliki suatu perubahan. Tugas dan tanggung jawab dari naskah perjanjian kerjasama yang pertama kurang begitu jelas mengenai proporsi pembagian tugasnya karena saat itu program kerja belum ada sehingga terkadang hubungan bersifat sporadis (jarang-jarang) seperti yang telah dikemukakan pada bagian hasil penelitian (bab 4).

Di dalam naskah perjanjian kerjasama yang kedua telah dicantumkan apabila di dalam pelaksanaan kerja dari masing-masing bidang kerja membutuhkan suatu tim atau kelompok kerja lebih banyak maka kelompok kerja tersebut dapat dibentuk secara temporer tergantung keperluannya dan dapat dibubarkan kembali jika sudah selesai bekerja. Hal ini menunjukkan suatu sistem bekerja yang lebih efisien dan efektif, dimana tidak diperlukan jumlah individu yang terlalu banyak untuk menjabat sebagai anggota dari tim MS.

Organisasi Majelis Sekolah dibentuk agar dapat menjadi unit sosial yang paling efektif dan efisien. Efektifitas organisasi diukur dari tingkat sejauh mana ia berhasil mencapai tujuannya, sedangkan efisiensi organisasi dikaji dari segi jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkan suatu unit masukan (unit of output). Biasanya masukan berkaitan erat, tetapi tidak sama, dengan tujuan organisasi (Etzioni, 12).

3. Kesimpulan dari pertanyaan pokok penelitian yang ketiga, yaitu mengenai sistem pemilihan anggota tim MS.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa unsur-unsur pembentuk tim Majelis Sekolah STM Penerbangan Negeri Bandung dan PT Industri Pesawat Terbang Nusantara Bandung berbeda dengan tim MS lainnya yang ada di negara kita. Hal ini berdasarkan pada mekanisme kerja dan kepentingan setempat, serta agar tim MS ini dapat berjalan dengan lancar.

Apabila tim MS yang dibentuk tidak melibatkan wakil dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam area-nya, atau terlalu kebirokratisasian, atau yang menjadi anggotanya adalah individu-individu yang menjabat kedudukan yang penting-penting sehingga tidak mempunyai waktu yang banyak dalam organisasi, maka dikhawatirkan pelaksanaan dari mekanisme kerja tim MS tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal-hal seperti ini

hampir sama dengan pendapat dari Finch & Mc Gough pada bab II di muka.

Oleh karena itu tim MS yang dibentuk oleh tim Koordinasi atas kebijakan dari Tim Pengarah menyepakati bahwa sistem pemilihan keanggotaan tim MS lebih tepat berdasarkan pada bidang kerja yang sedang diembannya, sehingga tugas dan tanggung jawab sesuai pada proporsinya. Dengan demikian kemungkinan besar dan sesuai dengan hasil penelitian dari penulis bahwa pelaksanaan dari mekanisme kerja dengan sistem ini dapat berjalan lancar.

Jika kita mengikuti kaidah dari Norton (1976), maka untuk mencari individu-individu yang memiliki sikap dan perilaku seperti yang tertulis dalam bab II, maka kriteria apakah yang akan menjadi indikator bahwa orang-orang tersebut telah memenuhi kriteria-kriteria yang menjadi persyaratan dari keanggotaan tim "advisory committee", serta berapa lamakah kita akan mencari orang-orang yang memiliki sikap dan perilaku seperti itu. Dapat saja karena masalah keanggotaan dari tim, maka tujuan utama dari mengadakan hubungan kerjasama ini tidak dapat terwujud.

Unsur-unsur pembentuk tim MS yang berdasarkan perjanjian kerjasama yang pertama dan kedua terdapat sedikit perubahan. Dimana unsur-unsur pembentuk tim MS berdasarkan perjanjian kerjasama yang pertama terdiri dari STM Penerbangan Negeri Bandung, PT IPTN, staf

bidang Dikmenjur, dan wakil dari perusahaan penerbangan. Sedangkan unsur-unsur pembentuk tim MS yang berdasarkan perjanjian kerjasama yang kedua yaitu SMK, Bidang Dikmenjur, Diklat BUMNIS, Direktur produksi, Direktur umum dan Direktur teknologi BUMNIS, industri pemasok kebutuhan bahan baku dan komponen BUMNIS, pengguna hasil produksi BUMNIS, Kandeptaker setempat, dan pihak lain yang terikat. Dapat dilihat disini, bahwa terdapat pengembangan jumlah unsur-unsur yang terlibat, hal ini dikarenakan PT IPTN termasuk salah satu dari 10 buah industri di bawah naungan BPIS. Sedangkan STM penerbangan diganti menjadi SMK, maksudnya sejumlah STM yang terlibat hubungan kerjasama dengan industri-industri yang tergabung dalam BPIS ini dapat termasuk dalam anggota tim MS yang berdasarkan naskah perjanjian kerjasama antara Dikdasmen Depdikbud dan BPIS. Oleh karena itu, dengan memperhatikan fungsi Majelis Sekolah, maka setiap SMK hanya dapat menjadi anggota dalam 1 (satu) Majelis Sekolah.

Dengan kita berpedoman pada bidang kerja dalam membentuk tim MS, maka siapapun orangnya akan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan bidang kerja yang menjadi tugasnya. Dalam hal inipun para pimpinan yang menempatkan posisi orang-orang tersebut pada bidang kerjanya sudah tentu berdasarkan kemampuan kerja yang telah diperlihatkan oleh individu tersebut secara tidak langsung.

4. Kesimpulan terhadap pertanyaan pokok penelitian yang keempat, yaitu mengenai proses penyelenggaraan program Pendidikan Sistem Ganda (PSG).

Tim MS dalam proses penyelenggaraan program PSG ini telah menggunakan kaidah-kaidah manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Hal ini dapat dibuktikan dari informasi langsung dan tertulis serta data yang ada dari kerja nyata tim MS ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Di dalam tugas dan kewajiban tim MS berdasarkan perjanjian yang pertama bahwa tim MS ini telah berperan membantu penyelenggaraan program PSG ini dari sejak memasyarakatkan maksud dari PSG ke industri, penandatanganan kerjasama, pembentukan tim untuk Sistem Ganda, pemasyarakatan program PSG ke masyarakat melalui orang tua murid, guru dan karyawan, dan masih banyak hal yang lainnya yang dapat dilihat pada Program Kerja Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (terlampir).

Setelah membuat rencana program pelaksanaan PSG, tim MS inipun membuat jadwal kegiatan SG STM Penerbangan Negeri Bandung untuk tahun 1994 (terlampir), membuat Pola Sistem Ganda STM Penerbangan Negeri Bandung dengan PT IPTN (terlampir), membuat contoh sertifikat telah melaksanakan PSG (terlampir), sedangkan untuk pengawasan kurang berjalan lancar baik dari sekolah maupun industri sendiri, tetapi untuk pengevaluasian proses penyelenggaraan PSG ini telah dilakukan dengan meng-

edarkan sejumlah angket pada siswa yang telah melaksanakan PSG (terlampir).

Dengan demikian berdasarkan hasil angket diperoleh jawaban bahwa : (1) Pelaksanaan Program PSG bisa dikatakan 63% cukup berhasil; (2) Peranan Pembimbing dalam hal pengarahan/petunjuk maupun pengawasan dari pelaksanaan program PSG 77 % cukup memuaskan; (3) Peningkatan Mutu dan Relevansi antara pengetahuan atau keterampilan yang diberikan di sekolah maupun yang didapatkan di PT IPTN hasilnya 78 % cukup bermutu; (4) Dari segi tugas/-job yang diberikan hasilnya sangat rendah (34 %). Hal ini dikarenakan adanya distribusi Job/cara kerja yang berbeda diantara para Operator serta tidak adanya kesempatan yang diberikan langsung pada siswa untuk mengerjakannya dikarenakan belum mempunyai lisensi; (5) Disiplin kerja, baik para karyawan maupun siswa PSG kurang dikarenakan tidak adanya pengawasan; (6) Penggunaan alat-alat safety kurang merata. Hal ini terjadi karena kurangnya peralatan dan rasa kesadaran.

5. Kesimpulan terhadap pertanyaan pokok penelitian yang kelima, yaitu mengenai kedudukan dan peranan dari Tim MS dalam struktur organisasi Pola Kerjasama Pelaksanaan program PSG.

Kedudukan dari tim MS ini berada di luar struktur organisasi intern sekolah dan bertempat di sekolah menengah kejuruan, karena pihak lembaga pendidikan akan memiliki waktu lebih banyak untuk mengatur segala se-

suatu yang berhubungan dalam hubungan kerjasama tersebut, serta peserta didik berpusat di sekolah dan pihak sekolah yang lebih berkepentingan agar hubungan kerjasama ini tetap terbina dengan baik. Mengamalkan berdasarkan pada naskah perjanjian kerjasama bahwa tempat tim MS secara operasional di STM Penerbangan Negeri Bandung dan Kepala Sekolah pada Naskah Perjanjian Kerjasama yang pertama sebagai ketua tim MS. Sedangkan pada Naskah Perjanjian Kerjasama yang kedua dan berdasarkan kesepakatan bersama dalam hasil pertemuan di bagian Diklat PT PAL Surabaya sebagai Wakil Ketua Majelis Sekolah dan wakil dari industri sebagai ketua Majelis Sekolah.

Ditinjau dari fungsinya, tim MS ini yang mengatur dan mengurus hubungan kerjasama antara sekolah dan industri, serta yang menyelesaikan persoalan yang terjadi antara sekolah dan industri. Jika permasalahan yang ada pada tim MS tidak dapat atau dapat diselesaikan maka tim MS harus melaporkan permasalahan tersebut kepada tim koordinasi, dan untuk selanjutnya tim koordinasi melaporkan pada tim pengarah.

Misalnya tim MS mengevaluasi pelaksanaan program Pendidikan dengan Sistem Ganda, maka hasilnya setelah dipelajari oleh tim MS kemudian dilaporkan pada tim koordinasi kemudian tim koordinasi melaporkan pada tim pengarah. Tanggapan dari tim pengarah kemudian diberikan kembali pada tim koordinasi untuk disampaikan pada

tim MS. Setelah itu tim MS mempelajari tanggapan tersebut dan begitu selanjutnya, yang akhirnya disepakati untuk membuat program kerja yang lebih operasional untuk penyelenggaraan program PSG yang akan datang, serta pengiriman instruktur ke sekolah untuk memberikan pengetahuan praktek dasar sebelum melakukan PSG di industri. Keputusan ini disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja sama.

Pihak SMK dan BUMNIS perlu membahas dan menyepakati hal-hal yang berhubungan dengan program PSG, seperti : (1) Standar profesi, (2) Standar Pendidikan dan Latihan, (3) Sistem Pengujian, (4) Sertifikasi, dan hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan program PSG yang tercantum di dalam naskah perjanjian kerjasama. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim MS, sebagai wadah kerjasama, konsultasi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan PSG pada tingkat SMK dan BUMNIS.

6. Kesimpulan terhadap pertanyaan pokok penelitian yang keenam, mengenai keuntungan dan kendala bagi pihak sekolah, murid, dan industri dalam penyelenggaraan program PSG.

A. Keuntungan bagi pihak sekolah, murid, dan industri.

1. Keuntungan dari pihak sekolah

Mengacu pada tujuan pendidikan bahwa penyelenggaraan program PSG ini untuk memberi keahlian profesional bagi peserta didik serta tanggungan biaya pendidikan

agar menjadi lebih ringan bagi pihak sekolah, kemudian agar terdapat kesesuaian dan kesepadanan antara program pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja dan memberikan kepuasan bagi penyelenggara pendidikan (sekolah), karena tamatannya lebih terjamin memperoleh bekal yang bermakna baik untuk kepentingan tamatan, dunia kerja dan bangsa. Maka dari itu dengan mengelola pendidikan melalui program PSG diharapkan hal-hal seperti ini dapat terwujud.

Sudah sering kita baca dalam media masa, Presiden dalam berbagai kesempatan, seperti pada peresmian pembukaan Musyawarah Nasional III ISPI mengamanatkan bahwa "Pembangunan pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan dalam PJP II, era tinggal landas. Sebab, sasaran utama PJP II, yaitu terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri serta dapat kita wujudkan jika pendidikan masyarakat berhasil kita tingkatkan" (Istana Negara, 1994 dari tulisan Engkoswara dalam Kompas 5/1/-1995).

2. Keuntungan dari pihak murid

Hasil belajar siswa akan lebih bermakna, karena setelah tamat diharapkan para siswa telah memiliki keahlian profesional sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya, serta sebagai bekal bagi pengembangan dirinya secara berkelanjutan. Selain itu waktu untuk

mencapai keahlian profesional menjadi lebih singkat.

Siswa-siswa yang telah mengikuti program PSG akan tidak memerlukan waktu latihan lanjutan untuk mencapai tingkat keahlian siap pakai.

Keahlian yang diperoleh selama program PSG akan meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri tamatan, dan selanjutnya dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan diri lagi ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Keuntungan dari pihak industri

Di negara republik federasi German perusahaan dengan sengaja melengkapi latihan dengan teratur dan dari dana perusahaan sendiri, karena mereka beranggapan bahwa "dual system" cara yang terbaik dalam melengkapi kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja yang berkemampuan (skilled workforce), melalui pengalaman, tenaga kerja berkemampuan tersebut dilatih terus menerus untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan mereka sendiri dari persaingan (The Federal Minister for Education and Science, 1993:24).

Mengambil makna dari kalimat di atas tersebut, berarti dengan menyelenggarakan program PSG dapat memberikan keuntungan nyata bagi industri atau perusahaan, antara lain pihak industri atau perusahaan dapat mengenal dengan persis kualitas peserta didik yang belajar dan bekerja di industri atau perusahaan. Jika industri atau perusahaan menilai orang tersebut dapat menjadi aset di industri atau perusahaan, maka anak tersebut

dapat direkrut langsung dan jika sebaliknya maka tidak ada keharusan bagi industri atau perusahaan untuk memperkerjakan anak tersebut apabila telah tamat sekolah.

Pihak industri mengharapkan dengan adanya peserta didik di industri, maka akan meningkatkan proses produksi karena mereka akan bekerja pada bagian lini produksi. Seperti Pendidikan Sistem Ganda yang telah dilakukan PT PAL dengan STM Perkapalannya, bahwa peserta didik secara langsung melaksanakan aspek produktif itu di industri perkapalan, sehingga para peserta didik menerima pendidikan dengan peralatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu peserta didik ini akan langsung menjadi aset perusahaan dan merupakan tenaga kerja yang dibayar murah.

Keuntungan lainnya selama proses pendidikan dengan melalui kerja praktek di industri, peserta didik lebih mudah diatur dalam disiplin. Sedangkan dalam hal biaya akan mengurangi anggaran biaya pelatihan bagi calon karyawan yang akan diterima atau dibutuhkan. Selain itu dapat mengurangi jurusan pendidikan pada apprentice training serta dapat difokuskan pada pendidikan khusus dengan Job grade yang lebih tinggi.

Selain itu pihak industri mengharapkan dengan adanya peserta didik di industri maka akan meningkatkan proses produksi karena mereka akan bekerja pada bagian lini produksi sehingga dapat menunjukkan aspek produktif yang telah dimilikinya dan bukan menjadi beban

industri atau perusahaan.

B. Kendala dari pihak sekolah, murid, dan industri.

1. Kendala dari sekolah

Tim monitoring dari sekolah tidak dapat bekerja secara penuh di industri, karena tidak ada pendanaan khusus untuk kegiatan ini. Selain itu waktu untuk PSG bagi siswa-siswa yang melaksanakan program PSG belum tepat, karena anak-anak tersebut baru naik ke kelas III, dimana kemampuan yang bersifat aplikatif belum diperoleh selama di sekolah dan tidak memungkinkan untuk mengundurkan waktu PSG karena ada kegiatan kurikulum lainnya.

2. Kendala dari siswa.

Terdapat sejumlah siswa yang absen karena sakit, ijin, alpha atau hal-hal lainnya selama mengikuti kegiatan PSG di industri sebanyak 60 hari kerja (data terlampir). Kemungkinan hal ini, dikarenakan sikap mental anak yang belum siap dengan waktu kerja industri, tetapi untuk kehadiran sejumlah besar siswa lainnya menunjukkan angka yang cukup baik, yaitu sekitar 99.1 persen.

Selain itu seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa untuk keterampilan dasar dan pengetahuan yang bersifat aplikatif belum ada bekal dari sekolah sehingga aspek produktif yang diharapkan industri dari anak masih belum tercapai dan kelihatannya keadaan ini masih

menjadi beban bagi industri.

Untuk mengatasi kemampuan yang dimiliki anak, maka pihak industri memutuskan pada tahun ajaran 1995/1996, sebelum mereka akan melaksanakan program PSG, terlebih dahulu akan dikirimkan ke sekolah beberapa instruktur yang akan memberikan pengetahuan praktek dasar yang diharapkan dapat membekali tenaga terdidik di industri nanti. Jadi kemungkinan dari keputusan tersebut adalah bagaimana mengelola kegiatan tersebut agar pembuatan modul dapat berjalan lancar, pendanaan memungkinkan, dan pengaturan waktu di sekolah dapat disesuaikan sesudah kegiatan kurikuler seperti biasanya. Harapan dari pihak industri bahwa kegiatan pengiriman instruktur ini dapat dimasukkan dalam pengembangan isi kurikulum selanjutnya.

2. Kendala dari industri

Informasi mengenai PSG belum diterima secara merata, sehingga pembimbing yang melaksanakan PSG sebahagian masih bersifat membimbing anak PKL, jadi anak-anak hanya sebagai pengamat (observer) daripada sebagai yang terlibat langsung.

Dalam hal aspek produktif belum dapat diperoleh dari siswa-siswa yang telah melaksanakan PSG ini berhubungan hal-hal yang telah disebutkan di atas tadi serta masih banyak peralatan yang baru dapat dikerjakan jika tenaga kerja tersebut berlisensi. Oleh karena itu dari

segi tugas/job yang diberikan berdasarkan pada hasil angket diperoleh sangat rendah (34 %). Hal ini disebabkan adanya distribusi job/cara kerja yang berbeda diantara para operator serta tidak adanya kesempatan yang diberikan langsung pada siswa serta process sheet atau lembar kerja banyak yang berbahasa inggris sehingga menjadi kendala bagi siswa. Selain itu dalam menggunakan alat-alat safety kurang merata, hal ini terjadi karena kurangnya peralatan dan rasa kesadaran.

7. Yang menjadi kesimpulan untuk pertanyaan pokok penelitian yang ketujuh, yaitu mengenai keuntungan dan kendala tim MS dalam membina hubungan kerjasama antara pihak sekolah dan industri.

A. Keuntungan dalam membina hubungan kerjasama

Dengan mengadakan hubungan kerjasama antara sekolah dan industri, sudah tentu dapat jelas terlihat manfaatnya bagi kedua belah pihak. Hal ini dapat terjadi jika kedua belah pihak dapat saling mengisi kebutuhan mereka masing-masing untuk suatu tujuan meningkatkan sumber daya manusia.

Hubungan yang terjadi antara STM Penerbangan Negeri Bandung dengan PT IPTN sudah melibatkan banyak hal, diantaranya sejak mulai didirikan sekolah itu bantuan tempat praktek bagi siswa-siswa, fasilitas alat-alat dan bahan untuk praktek, menerima siswa-siswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), menerima kunjungan baik dari sekolah ke industri maupun

industri ke sekolah, industri memberikan kesempatan bagi tenaga kependidikan untuk melaksanakan Program Peningkatan Pendidikan Spesialisasi Aeronautica Guru (OJT). Untuk selanjutnya setelah hubungan kerjasama ini berlanjut pada periode kedua, program PSG mulai digalakkan di lingkungan pendidikan dan ternyata PT IPTN sudah mengenali program PSG dari sejak industri tersebut mengirinkan para stafnya untuk berkunjung ke negara republik federasi German, akan tetapi program PSG di negara kita pada pelaksanaannya belum ada keseragaman. Hal ini disebabkan informasi yang diterima mengenai Pendidikan dengan Sistem Ganda belum merata, masih banyak industri-industri yang belum memahami maksud dari PSG ini. Kiranya dalam hal penyampaian informasi mengenai PSG ini perlu lebih ditingkatkan oleh pihak yang berkepentingan, agar sasaran yang diharapkan dapat tercapai.

Hubungan selanjutnya yang terjalin dalam periode kedua, yaitu pengembangan kurikulum dimana pihak industri sudah turut serta menentukan isi dari kurikulum, kemudian memonitoring pelaksanaan EBTA, uji profesi, penyaluran tamatan, hingga penyelesaian penandatanganan kerjasama antara Dirjen Dikdasmen Depdikbud-BPPT-PT IPTN, serta mengembangkan kerjasama dengan perusahaan penerbangan lainnya. Untuk selanjutnya penandatanganan naskah kerjasama tersebut berkembang menjadi antara Dirjen Dikdasmen Depdikbud dan BPIS.

Dengan memperhatikan naskah perjanjian kerjasama antara Dirjen Dikdasmen Depdikbud dengan Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) tentang Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan melalui Pendidikan dan Pelatihan Sistem Ganda Nomor : 013/M/-BPIS/VIII/94 dan Nomor : 021a/u/94 tgl.19 agustus 1994, kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk menindaklanjuti kerjasama yang dimaksud, sebagaimana yang telah dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama antara pihak pertama dan kedua dengan bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang dapat memenuhi kebutuhan industri melalui penyelenggaraan Pendidikan dengan Sistem Ganda (PSG) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang ada pada kedua belah pihak. Maka dari itu, sudah jelas bahwa hubungan kerjasama ini perlu dibina terus menerus agar pengetahuan yang diberikan di sekolah dapat "link and match" dengan keterampilan yang ada di industri. Dengan demikian kualitas Sumber Daya Manusia dapat ditingkatkan.

B. Kendala dalam membina hubungan kerjasama

Pada prinsipnya kendala dalam membina hubungan kerjasama antara sekolah dan industri hampir jarang terjadi, biasanya manfaat yang lebih dapat dirasakan.

Pada awal hubungan kerjasama dibentuk, kemudian pada saat itu ada pelatihan tenaga kependidikan (OJT), para guru selain merasa senang dapat menambah kemampu-

annya tetapi juga merasa mendapat beban apabila melakukan pendidikan tambahan di industri, karena penggantian dana tidak ada sedangkan waktu sore hari biasanya dipergunakan untuk mencari tambahan penghasilan.

Selain itu, isi kurikulum 1984 secara teoritis terlalu lengkap sehingga ada bahan teori yang menggunakan bahan baku yang pada kenyataannya tidak dapat dipraktekkan karena bahan baku tersebut mahal dan masih banyak alat yang hanya dapat dioperasikan bagi tenaga kerja yang berlisensi.

Dalam hubungan kerjasama yang telah terjadi selama ini, program kerja yang lebih operasional dalam waktu jangka pendek, menengah, dan panjang belum dibuat oleh tim Majelis Sekolah, sehingga pekerjaan yang telah mereka lakukan selama ini lebih bersifat sporadis (jarang-jarang), jadi apabila ada yang akan dikerjakan baru ada hubungan, setelah itu keadaan biasa kembali. Memang bagi pihak sekolah hal-hal apa saja yang telah mereka lakukan selama mengadakan hubungan kerjasama mereka catat (terlampir) karena tenaga yang terlibat dalam tim Majelis Sekolah tidak banyak sehingga dalam tanggung jawab tidak ada kerancuan, tetapi pada industri hal seperti ini tidak mudah berlangsung jika tidak ada pembagian tugas yang jelas karena tenaga yang terlibat cukup banyak dan mereka menangani sejumlah tugas, sehingga dalam hal tanggung jawab jika tidak secara rinci ditugaskan kepada masing-masing pihak maka ke-

mungkinan besar akan tidak berjalan.

Oleh karena itu setelah hubungan ini semakin berlanjut ke arah program Pendidikan dengan Sistem Ganda (PSG) serta pelaksanaan tugas yang mereka lakukan telah mengikuti kaidah-kaidah manajemen, maka hasil dari hal itu semua telah menghasilkan sebuah program kerja yang lebih jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab bagi semua pihak. Program kerja tersebut akan dilaksanakan pada tahun ajaran 1995/1996 nanti.

Hal-hal yang menjadi kendala selama melaksanakan PSG, dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan pada program selanjutnya. Dengan demikian hubungan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik.

B. IMPLIKASI

Sebagai bagian implikasi dari tesis ini, adalah bagaimana kita mendekati industri, agar industri merasa berkepentingan dengan program PSG. Berhubung tidak semua industri atau perusahaan dapat memahami program PSG yang dimaksud.

Apabila kita berpikir pada prospek yang akan datang, maka keuntungan dengan adanya program Pendidikan dengan Sistem Ganda ini dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang kemungkinannya dapat menguntungkan baik bagi sekolah maupun industri yang turut berpartisipasi melaksanakan program tersebut, yaitu diantaranya :

1. Pada tahap awal, dengan adanya penyelenggaraan program PSG ini, maka tenaga kerja yang berkemampuan dapat direkrut langsung untuk menjadi aset bagi industri atau perusahaan. Dengan demikian ada suatu keuntungan bagi industri dalam melakukan hal ini, pihak industri tidak perlu memasang iklan untuk mencari tenaga kerja yang dibutuhkan, berarti telah terjadi penghematan biaya.
2. Pihak industri tidak perlu menyelenggarakan tes seleksi bagi tenaga kerja, karena kemampuan, sikap, dan kedisiplinan dari tenaga kerja yang diharapkan oleh pihak industri dapat diamati secara langsung selama mereka mengikuti pendidikan ini, dengan syarat pemberian pendidikan dalam program PSG terlaksana dengan benar, maka siswa-siswa yang telah selesai mengikutinya kemungkinan besar tidak perlu mendapatkan pendidikan lebih lanjut untuk menentukan bidang yang dikuasainya sesuai kemampuan awal yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kerja yang masih baru.
3. Dengan terselenggaranya program PSG, maka memudahkan perusahaan atau industri dalam memberikan standar gaji yang sesuai dengan kemampuan siswa, berdasarkan apa yang sudah diamati selama melaksanakan PSG.
4. Keuntungan dalam mendukung program PSG ini, akan meningkatkan reputasi perusahaan atau industri

karena sistem pembinaan Sumber Daya Manusia akan lebih kuat (kemampuan/skill siswa sudah terlihat) baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Dengan melihat pada prospek tersebut di atas, maka diharapkan industri atau perusahaan dapat turut berpartisipasi mengadakan ikatan kerjasama dengan sekolah-sekolah. Dalam hal ini sekolah-sekolah yang ingin mengadakan ikatan kerjasama tersebut harus dapat mengadakan pendekatan dengan berbagai industri atau perusahaan yang dikehendakinya, serta informasi mengenai program Pendidikan dengan Sistem Ganda ini harus lebih giat diperkenalkan pada berbagai industri atau perusahaan. Selain itu para pengambil kebijakan dapat turut mendukung terselenggaranya program kerjasama tersebut, dan berusaha untuk menyesuaikan isi kurikulum dengan program PSG.

Agar program PSG ini dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka hasil dari mengevaluasi kegiatan PSG dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya. Kendala-kendala yang terjadi pada kegiatan PSG yang sudah berjalan agar segera diperbaiki dan tidak terulang pada program PSG selanjutnya. Kebaikan-kebaikan dari hasil menyelenggarakan PSG tersebut agar lebih ditingkatkan terus.

Dalam hal unsur-unsur pembentuk tim Majelis Sekolah, perlu dipertimbangkan dengan matang. Jangan sampai terbentuk suatu tim yang tidak berjalan dengan lancar, misalnya diakibatkan jumlah anggota tim terlalu banyak,

tidak ada program kerja yang jelas sehingga saling menumpahkan tanggung jawab, tidak memiliki waktu untuk bekerjasama berhubung kesibukan yang dimiliki, atau anggota-anggotanya bukan perwakilan dari unsur-unsur yang berkepentingan. Tim Majelis Sekolah ini pun harus dipandang sebagai suatu organisasi yang memiliki kaidah-kaidah manajemen dalam pelaksanaan kerjanya, agar keberhasilan dalam mencapai tujuan dapat diketahui bersama.

C. Rekomendasi

Untuk implikasi lebih lanjut bagi pengambil kebijakan di dalam Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan melalui Pendidikan dan Pelatihan dengan Sistem Ganda Nomor : 013/M/BPIS/VIII/94 dan Nomor : 021a/U/94 tgl. 19/8/94, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berserta BPIS menyatakan sepakat untuk menindaklanjuti kerjasama yang dimaksud. Maka sejumlah masukan dari hasil penelitian di dalam tesis ini kiranya dapat sebagai sumbang saran dalam mengembangkan hubungan kerjasama tersebut. Adapun sumbang saran ditujukan pada beberapa pihak yang tertulis di bawah ini.

1. Bagi Dirjen Dikdasmen Depdikbud

Dirjen Dikdasmen Depdikbud sebagai pihak pertama dalam naskah perjanjian kerjasama, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi penyelenggaraan PSG. Oleh karena itu pihak pertama ini mempunyai tanggung jawab yang besar atas kesiapan tim Majelis Sekolah dalam penyelenggaraan PSG.

Pelaksanaan PSG di BUMNIS berdasarkan pada mekanisme kerja yang terdiri dari :

- a. Tim Pengarah
- b. Tim Koordinasi
- c. Majelis Sekolah
- d. Pelaksana

Tim Pengarah yang bertugas merumuskan kebijakan tentang pengelolaan pelaksanaan PSG yang kemudian menjadi pedoman kerja bagi Majelis Sekolah. Sedangkan Tim Koordinasi yang bertugas meningkatkan mutu pelaksanaan PSG dalam suatu keterpaduan maupun tiap-tiap BUMNIS yang melaksanakan PSG. Dan Tim Majelis Sekolah merupakan suatu wadah kerjasama, konsultasi, dan koordinasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan PSG pada tingkat SMK dan BUMNIS.

Dengan demikian yang menjadi tumpuan dasar atas terselenggaranya program PSG ini adalah Tim Pelaksana yang tergabung dalam Tim Majelis Sekolah. Dimana tim ini yang menjalankan program kerjasama tersebut. Oleh karena itu unsur-unsur utama yang harus ada sebagai anggota tim Majelis Sekolah adalah dari pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu dari wakil-wakil Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan BUMNIS, agar tim Majelis Sekolah ini dapat berjalan lancar juga merupakan tim yang benar-benar mengetahui dengan pasti sasaran apa

yang ingin dicapai dalam hubungan kerjasama tersebut.

Tim Majelis Sekolah ini tidak memerlukan banyak anggota di dalamnya, seperti apa yang telah ditulis Finch & Mc Gough dalam bukunya (1982) bahwa pengalaman menunjukkan jumlah anggota yang besar, akan cenderung canggung dan kurang berfungsi. Apalagi jika tidak ada tugas dan tanggung jawab yang jelas. Misalnya hanya dikatakan saling berkoordinasi, maka pihak mana yang akan bertanggung jawab.

Karakteristik penyeleksian tim "advisory committee" (Norton :1976) berdasarkan pada apa yang tercantum dalam bagian studi pustaka di muka, bahwasannya belum dapat terlaksana berhubung tim Majelis Sekolah antara STM Penerbangan Negeri dan BPIS, anggota-anggotanya dikelompokkan berdasarkan pada bidang kerja yang sedang diembannya bukan berdasarkan pada keprofesian atau kewilayahan. Maksudnya agar tim Majelis sekolah ini dapat berjalan lancar sesuai dengan sasaran yang diharapkan dan bukan berarti sebagai tempat pertemuan saja bagi orang-orang yang tidak terlalu berkepentingan.

Untuk selanjutnya berdasarkan pengalaman tim Majelis Sekolah dari STM penerbangan Negeri Bandung dan PT IPTN bahwasannya mereka terlibat langsung dalam penyelenggaraan program PSG, dengan menggunakan kaidah-kaidah manajemen seperti merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi. Maka dari itu jelas tidak mungkin jika tim ini hanya sebagai tempat konsultasi saja

dan tidak turut terlibat secara langsung.

Tim Majelis Sekolah yang mengetahui dengan pasti apakah penyelenggaraan PSG ini mencapai tujuan yang diharapkan atau telah mengalami sejumlah hambatan seperti yang telah dikemukakan dalam bab IV hasil penelitian. Dari hasil evaluasi tim Majelis Sekolah terhadap hasil penyelenggaraan PSG itulah, yang menghasilkan sejumlah saran-saran yang perlu diperhatikan untuk penyelenggaraan program PSG pada tahun ajaran 1995/-1996.

Adapun saran-saran yang perlu diperhatikan antara lain :

1. perlu diberikan penjelasan kepada para pembimbing tentang tujuan daripada program PSG, sehingga program PSG dapat berjalan sesuai dengan sasarannya (informasi diperoleh dari tim Majelis Sekolah yang ada di industri, bahwa mereka telah melakukan upaya langsung untuk mengatasi hal ini, dengan memberikan informasi pada para pembimbing serta melipatgandakan sejumlah informasi tertulis untuk dibagikan pada para pembimbing).

Hal ini yang terjadi di PT IPTN, bagaimana usaha Tim Pengarah/kebijakan dalam mengatasi kesimpang siuran informasi mengenai maksud dari PSG ini pada sejumlah industri yang lain. Dapat saja pihak Depdikbud mengadakan seminar-seminar dan mengundang sejumlah industri atau perusahaan, agar tujuan penyelenggaraan PSG berjalan sesuai dengan

sasarannya.

2. Perlu adanya peninjauan kembali dari kurikulum yang diberikan di sekolah dengan tugas/job yang diberikan sehingga dalam pelaksanaannya/cara kerjanya sesuai. Seperti yang telah dikemukakan pada bab IV hasil penelitian, bahwasannya waktu yang belum tepat bagi siswa-siswa yang telah melakukan program PSG yang lalu, karena pengetahuan yang bersifat aplikatif belum dikuasai dan mereka baru naik ke kelas III. Selain itu, waktu penyelenggaraan tidak dapat diundurkan berhubung ada kegiatan-kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan UU (Ulangan Umum). Masukan pula dari industri, apakah kegiatan PKL ini masih diperlukan setelah adanya program PSG. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan pula bagi Tim Pengarah/pengambil kebijakan.
3. Agar para siswa PSG dibekali pelajaran bahasa inggris dengan lebih mendalam sesuai keperluan untuk praktek kerja, dikarenakan process sheet/cara kerja yang diberikan dituangkan dalam bahasa inggris, sehingga tidak mempersulit siswa dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mengatasi hal ini apakah waktu untuk pemberian pelajaran bahasa inggris yang perlu ditambah atau materinya yang harus lebih diarahkan untuk pelaksanaan program

PSG, atau juga para guru bahasa Inggris mendapatkan contoh-contoh process sheet yang dikerjakan selama siswa melaksanakan PSG, sehingga secara tidak langsung para siswa sudah mengenal contoh model process sheet di industri.

4. Untuk mata pelajaran yang menjurus ke hal penerbangan (baik teori maupun praktek) agar lebih dipersiapkan untuk mempermudah pelaksanaan dari program PSG.

Tim Majelis Sekolah di PT IPTN mengatasi hal ini dengan mengirimkan instruktur ke sekolah untuk rencana penyelenggaraan PSG tahun ajaran 1995/-1996. Jadi sebelum pelaksanaan PSG di industri, para siswa diharapkan telah menerima pendidikan dasar praktek di sekolah. Akan tetapi berhubung kegiatan seperti itu dalam kurikulum belum ada, maka waktu pelaksanaan setelah kegiatan sekolah usai, yaitu pada sore harinya, untuk beberapa hari dalam seminggu. Hal-hal seperti ini haruslah menjadi pemikiran bagi tim pengambil kebijakan. Selain itu bagaimana mengenai pendanaan bagi para instruktur, modul-modul yang perlu dibuat, perubahan waktu bagi siswa, serta isi kurikulum, dsb.

2. Bagi pihak kedua yang mengelola BUMNIS

Pihak kedua ini, yang sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada, bertugas dan bertanggung jawab

untuk menyediakan kesempatan praktek kerja industri bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan di BUMNIS.

Salah satu tugas dan tanggung jawab dari pihak kedua untuk memberikan masukan pada pihak pertama mengenai kebutuhan tenaga kerja di BUMNIS baik jumlah, jenis, spesialisasi, maupun tahapannya sesuai dengan rencana jangka panjang dan pendek.

Memang sejauh ini, PT IPTN memberikan masukan pada STM Penerbangan Negeri Bandung mengenai kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan secara umum saja melalui iklan bahwa dibutuhkan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dengan melalui seleksi baru para siswa yang lulus dapat diterima untuk menjadi siswa yang akan masuk diklat dahulu.

Berdasarkan naskah perjanjian-kerjasama dalam penyelenggaraan PSG, telah disebutkan bahwa apabila ada siswa yang dapat menjadi calon untuk meningkatkan aset perusahaan maka anak tersebut setelah lulus nanti dapat ditarik menjadi tenaga kerja, jika sebaliknya tidak ada keharusan untuk menerima. Dalam menuju prospek yang akan datang dengan adanya penyelenggaraan PSG ini, tentu banyak manfaat dapat diperoleh.

Hal-hal tersebut di atas memberikan peluang besar akan mempermudah pihak industri dalam mencari tenaga kerja yang berkemampuan. Harapan dari pihak industri di Negara German, bahwa dengan mengadakan "dual system", maka tenaga kerjanya setelah mendapat pendidikan di

Sekolah Kejuruan, kembali ke perusahaannya akan menjadi seorang ahli, yang mendapat pengajaran teknik, dan dalam rangka pengembangan serta mengisi kesenjangan dengan pendidikan umum. Di Sekolah Kejuruan mereka mendapat pengajaran teknik 60%, pendidikan umum 40% (The Federal Minister for Education and Science, 1992:-7).

Tugas dan tanggung jawab yang lainnya dari pengelola BUMNIS diharapkan turut membantu dan menyebarluaskan kaidah-kaidah manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PSG, karena dengan melaksanakan kaidah-kaidah manajemen itu maka tujuan yang akan dicapai dapat jelas sasarnya, dan apakah hasilnya nanti telah mencapai tujuan yang diharapkan dapat dilihat dari hasil evaluasi. Hasil evaluasi ini yang berguna untuk mengendalikan keadaan dan meningkatkan kemajuan pada penyelenggaraan PSG selanjutnya.

Oleh karena itu baik pihak Depdikbud maupun pihak pengelola BUMNIS perlu terus memantau hubungan kerjasama ini serta penyelenggaraan PSG yang berlangsung. Keadaan seperti ini, bukan berlaku bagi STM Penerbangan Negeri Bandung dan PT IPTN saja, melainkan dapat berlaku bagi SMK lainnya dengan perusahaan atau industri pasangannya baik yang/tidak tergabung dalam BUMNIS.

Rekomendasi bagi pihak-pihak yang berwenang dalam menentukan tugas dan kewajiban dari Majelis Sekolah.

Apabila kita menganalisa lebih jauh fungsi Majelis Sekolah terhadap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan hasil pertemuan 29 Nopember 1994 di PT PAL Surabaya, ditinjau dari sudut pengertian Majelis Sekolah (MS), tugas dan kewajiban, serta fungsi organisasi, maka dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih antara tugas dan kewajiban seorang pimpinan sekolah dengan fungsi Majelis Sekolah terhadap SMK.

Dari sudut pengertian, Majelis Sekolah adalah wadah kerjasama, konsultasi, dan koordinasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Pendidikan dengan Sistem Ganda (PSG) pada tingkat SMK dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS).

Dipandang dari sudut kedudukan, Majelis Sekolah berada di luar dari struktur organisasi intern sekolah. Dimana Majelis Sekolah dipandang secara kelembagaan merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan kewajiban tersendiri, dan pimpinan sekolah pun memiliki tugas dan kewajiban tersendiri terhadap sekolah yang di bawah asuhannya. Dengan demikian berarti sekolah dan Majelis Sekolah merupakan dua buah organisasi yang memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri.

Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 1992 dalam rangka memperlancar peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pen-

didikan Nasional, adapun sebahagian isinya Forum konsultasi sebagaimana yang diatur pada pasal 10 ... cukup memadai untuk menjadi pendamping pimpinan sekolah dalam menjalankan program pendidikan di SMK.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989 pasal 38, diberikan keleluasaan kepada pihak sekolah untuk menyesuaikan materi kurikulum yang diberlakukan secara nasional terhadap keadaan dan tuntutan kebutuhan lingkungan lapangan kerja secara dinamis. Dengan perkataan lain, kurikulum SMK yang diberlakukan secara nasional, pada dasarnya merupakan standar minimal, yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut.

Jika diambil makna dari isi pasal 10 PP No. 39 Th. 1992 maka Majelis Sekolah berperan sebagai mitra pimpinan sekolah dalam menjalankan program pendidikan di SMK, sedangkan isi pasal 38 UU No. 2 Th 1989 menjelaskan bahwa pihak sekolah mendapat kewenangan untuk menyesuaikan materi kurikulum dengan tuntutan kebutuhan lingkungan lapangan kerja.

Dengan demikian fungsi Majelis Sekolah ini dapat saja dirangkap pihak sekolah, yaitu dengan cara mengadakan secara langsung hubungan dengan dunia kerja tanpa harus membentuk terlebih dahulu Majelis Sekolah, seperti Majelis Sekolah antara SMK dengan BUMNIS. Jadi anggota Majelis disini hanya dari pihak SMK dan BUMNIS saja dan mungkin dapat melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Hubungan antara sekolah dan dunia kerja dapat berlangsung dengan baik apabila pihak sekolah memiliki inisiatif untuk mendekati dunia kerja dan dunia kerja pun memberi kesempatan untuk menerima pihak sekolah. Hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan apabila pihak Sekolah bersikap pasif. Oleh karena itu hasil pertemuan tanggal 29 Nopember 1994 di PT PAL Surabaya memutuskan bahwa sebagai pimpinan Majelis Sekolah adalah dari pihak industri, agar pihak industri lebih dapat merangkul pihak sekolah.

Melihat kelebihan dari tugas dan kewajiban Majelis Sekolah yang berdasarkan hasil pertemuan tanggal 29 Nopember 1994 itu, yaitu Majelis ini telah melibatkan langsung baik dari pihak SMK maupun pihak industri sebagai anggota Majelis Sekolah, maka anggota-anggota Majelis ini setelah melaksanakan pertemuan kemudian kembali pada instansinya masing-masing dan dapat mengelola langsung hal-hal yang diperlukan dari sekolah untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan dengan Sistem Ganda, demikian pula dari pihak industri.

Kelemahan dari isi tugas dan kewajiban Majelis Sekolah hasil pertemuan tanggal 29 Nopember 1994 adalah diragukan akan terjadi tumpang tindih dengan tugas dan kewajiban pimpinan sekolah karena isinya melakukan hal-hal yang tercantum di dalam tugas dan kewajiban Majelis Sekolah secara langsung tidak seperti isi tugas dan kewajiban Majelis Sekolah yang berdasarkan Naskah Per-

janjian Kerjasama antara Dikdasmen Depdikbud-BPPT-PT IPTN, Majelis Sekolah di dalam naskah ini berfungsi membantu pimpinan SMK. Jadi sesuai dengan pengertian dan kedudukan Majelis Sekolah yang berada di luar sekolah, maka fungsi membantu pimpinan sekolah adalah benar.

Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka ada baiknya isi tugas dan kewajiban dari Majelis Sekolah yang berdasarkan hasil pertemuan tanggal 29 Nopember 1994 ditelaah kembali dan harus jelas perbedaan tugas dan kewajiban dari pimpinan sekolah dan fungsi dari Majelis Sekolah terhadap Sekolah Menengah Kejuruan.

Hal tersebut di atas akan tidak berakibat fatal apabila yang menjadi anggota Majelis Sekolahnya dari pihak SMK dan pihak industri, jadi terlibat secara langsung pihak-pihak yang berkepentingan. Tetapi ketidakjelasan dari fungsi Majelis Sekolah terhadap SMK dengan fungsi pimpinan sekolah, sedangkan yang menjadi anggota Majelis tidak melibatkan pihak sekolah maupun industri maka hal ini dapat mengakibatkan intervensi (campur tangan) dari Majelis Sekolah terhadap sekolah. Oleh karena itu ditinjau secara birokrasi, kelembagaan Majelis Sekolah berbeda dengan kelembagaan sekolah dengan tanpa mempertimbangkan anggota-anggota yang terlibat.

